

# Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang)

Ida<sup>1)\*</sup>, Jenni<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>imeldaidabasri@yahoo.co.id

<sup>2)</sup>jenni.jenni@ubd.ac.id

---

## Article history:

Received 16 May 2021;  
Revised 3 Juni 2021;  
Accepted 8 Juni 2021;  
Available online 10 Juni 2021

---

## Keywords:

Kewajiban Kepemilikan NPWP  
Kesadaran Wajib Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak  
Pemahaman Perpajakan

---

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Peumahan Permata Regensi II Tangerang. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak memperlihatkan hasil yang sama dan juga berbeda. Oleh karena itu, penelitian lain dilakukan untuk menguji teori tentang kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 133 orang. Metode atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan memperhitungkannya menggunakan rumus slovin, sehingga dapat ditentukan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 100. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 24,0, dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir dengan uji hipotesis. Hasil penelitian yang telah diolah menunjukkan bahwa nilai signifikan kewajiban kepemilikan NPWP sebesar 0,000, nilai signifikan pemahaman perpajakan sebesar 0,048 dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,015. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

---

## I. INTRODUCTION

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (tax evasion).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk

\* Corresponding author

pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalan pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen. Bahkan, rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3 persen (Tempo.co, 2013). Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Raksasa fesyen dunia, Gucci diduga terlibat kasus penghindaran pajak. Jaksa Penuntut Umum di Milan mendakwa produsen pakaian asal Italia ini atas penghindaran pajak selama beberapa tahun dalam penjualan di Swiss. Karena hal itu, Gucci menghemat 1,3-euro setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik. Investigasi ini dilaporkan berdasarkan laporan dari mantan pekerja senior Gucci yang sudah meninggalkan perusahaan ini. La Stampa mengatakan, polisi pajak selama 3 hari di kantor Gucci di Milan dan kantor-kantor lainnya (Suhendra, 2017).

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat juga beberapa faktor diantaranya Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Dewi & Jati, 2014).

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Kurniasih et al., 2013).

Kebijakan leverage yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. ). Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan angka nominal restitusi yang tercantum dalam laporan keuangan.

## II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

### **Pengertian Pajak**

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, yaitu: Menurut (Supramono & Damayanti, 2010) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut buku yang dikutip (Pohan, 2016) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self-assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Febriyanti, 2013).

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh wajib pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

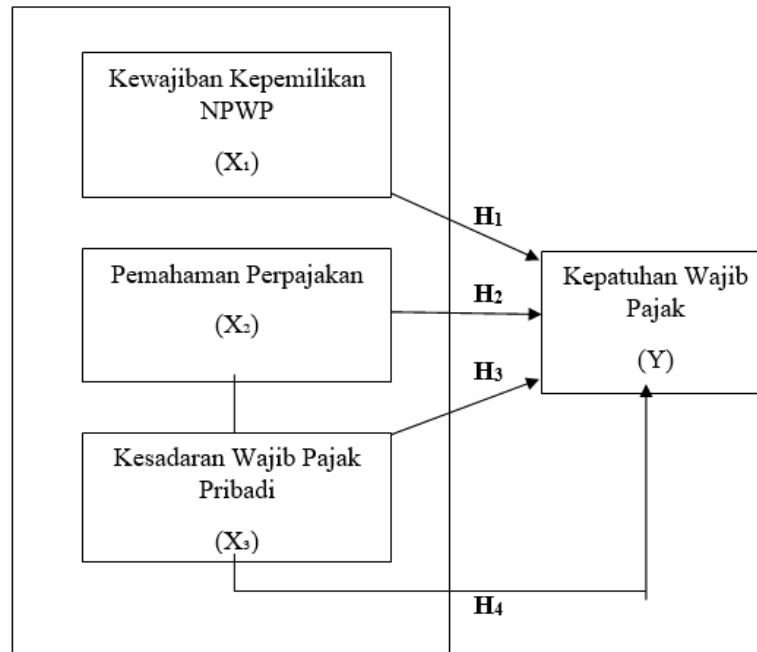
### **Kesadaran Wajib Pajak Pribadi**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat

### **Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Perumusan Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya yang berarti dugaan itu mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran serta gambar kerangka pemikiran yang dijabarkan diatas, maka dapat dikembangkan menjadi:

1. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Pajak merupakan penghasilan utama dan terbesar yang didapat oleh Negara. Masyarakat yang memiliki penghasilan tetap sudah sewajibnya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak menyadari kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hipotesa pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
H1 : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang). Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami pajak, kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan masyarakat yang malas untuk membayarkan pajaknya atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai wajib pajak. Hipotesa kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Perpajakan bukan hanya untuk dipahami, tetapi sebagai wajib pajak perlu adanya kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya kesadaran pada setiap diri wajib pajak, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hipotesa ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Ketiga poin yang sudah dijelaskan diatas memiliki keterkaitan khusus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Sehingga hipotesa terakhir dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
H4 : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### III. METHODS

Menurut pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena proses kerja berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angk-angka. Oleh karena itu dengan melakukan pendekatan kuantitatif peneliti dapat menganalisis pokok permasalahan secara lebih luas dan mendalam sehingga penulis lebih memilih pendekatan kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang khususnya di wilayah Perumahan Permata Regensi II

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang khususnya wilayah perumahan Regensi II. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu atau kriteria khusus didalam pengambilan sampelnya yaitu wajib memiliki NPWP dan memiliki penghasilan / pendapatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bantuan teknik wawancara langsung dengan ketua RW 06 di wilayah Perumahan Permata Regensi II untuk mengetahui jumlah warga yang bekerja atau yang memiliki pendapatan lainnya dan sekiranya memiliki NPWP yaitu sebanyak 133 warga, dengan begitu dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 133. Maka penulis menggunakan penentuan sampel dengan rumus dalam buku karangan yang berjudul Metode Penelitian Bisnis (Sugiyono, 2017:149):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{133}{1 + 133(0.05)^2} = 99.81$$

Berdasarkan jumlah sampel yang telah dihitung menggunakan rumus, penulis yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa sampel sebanyak 99,81. Penulis menggenapkan jumlah sampel menjadi 100 orang dan akan membagikan kuesioner kepada 100 orang di Perumahan Permata Regensi II Kota Tangerang

Karakteristik dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang memiliki penghasilan tetap
2. Orang pribadi yang memiliki NPWP

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Keterangan
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X <sub>1</sub> )	Pengertian pajak	Administrasi perpajakan	Ordinal
	Fungsi pajak	Identitas wajib pajak	
	Pemungutan pajak	Menjaga ketertiban pajak	
	NPWP	Dokumen perpajakan	
		Memiliki penghasilan tetap	
(Supramono & Damayanti, 2010) dalam bukunya : Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan.			
Pemahaman Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Ketentuan pajak	Memahami peraturan	Ordinal
	Paham pajak	Mengetahui hak dan kewajiban	
	Sosialisai pajak	Pembiayaan negara	
		Pendapatan negara	
		Sanksi pajak	
(Pohan, 2016) dalam bukunya : Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.			
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	Kesadaran wajib pajak	Pembangunan negara	Ordinal
		Membayar dan melapor	
		Tepat waktu	
		Penundaan pembayaran	
		Penyelenggaraan negara	

(Resmi, 2013) dalam bukunya : Perpajakan Teori dan Kasus.			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Patuh pajak	Memenuhi kewajiban	Ordinal
		Mengisi SPT	
		Menghitung pajak	
		Membayar tunggakan pajak	
		Kepatuhan peraturan	
(Kurnia, 2013) dalam bukunya : Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal			

### Teknik Analisis Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa adalah suatu uraian, kupasan dan data yaitu fakta atau fenomena yang sifatnya mentah belum dianalisis, seperti angka, nama dan sebagainya. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yaitu: Uji Validitas, Reliabilitas, Uji Statistik Deskriptif, Asumsi klasik, Heterokedastisitas, Regresi Berganda dan Hipotesis

## IV. RESULTS

### Analisis Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan /pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Jika korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid, begitu juga sebaliknya apabila total skor mempunyai tingkat signifikan lebih dari 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Tabel dibawah ini akan menunjukkan hasil uji validitas dari variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan dari variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP

		Correlations					TOTAL_
		KK N1	KK N2	KK N3	KK N4	KK N5	KKN
KK N1	Pearson Correlation	1	,465 **	,479 **	,497 **	,674 **	,780**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KK N2	Pearson Correlation	,465 **	1	,637 **	,425 **	,266 **	,739**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,007	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KK N3	Pearson Correlation	,479 **	,637 **	1	,560 **	,450 **	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KK N4	Pearson Correlation	,497 **	,425 **	,560 **	1	,604 **	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KK N5	Pearson Correlation	,674 **	,266 **	,450 **	,604 **	1	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TO TAL_	Pearson Correlation	,780 **	,739 **	,836 **	,785 **	,740 **	1

KKN	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan Tabel 2 menyatakan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kewajiban kepemilikan NPWP (KKN) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Maka secara keseluruhan dapat dilakukan uji-uji berikutnya.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

		Correlations					TOTAL_
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP
PP1	Pearson Correlation	1	,763**	,619**	,675**	,606**	,772**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	,763**	1	,755**	,675**	,420**	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	,619**	,755**	1	,737**	,520**	,758**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	,675**	,675**	,737**	1	,734**	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PP5	Pearson Correlation	,606**	,420**	,520**	,734**	1	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TO TAL_ PP	Pearson Correlation	,772**	,759**	,758**	,809**	,687**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan Tabel 3 menyatakan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel pemahaman perpajakan (PP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Maka secara keseluruhan dapat dilakukan uji-uji berikutnya.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations					TOTAL
		KS WP1	KS WP2	KS WP3	KS WP4	KS WP5	_KSWP
KSWP1	Pearson Correlation	1	,797**	,281**	,547**	,559**	,816**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KSWP2	Pearson Correlation	,797**	1	,321**	,509**	,466**	,792**
	Sig. (2-tailed)						
	N	100	100	100	100	100	100

	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KSWP3	Pearson Correlation	,281**	,321**	1	,478**	,336**	,637**
	Sig. (2-tailed)	,005	,001		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KSWP4	Pearson Correlation	,547**	,509**	,478**	1	,783**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KSWP5	Pearson Correlation	,559**	,466**	,336**	,783**	1	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_KSWP	Pearson Correlation	,816**	,792**	,637**	,848**	,798**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan Tabel 4 menyatakan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kesadaran wajib pajak (KSWP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Maka secara keseluruhan dapat dilakukan uji-uji berikutnya.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		KP WP1	KP WP2	KP WP3	KP WP4	KP WP5	TOTAL _KPWP
KPWP1	Pearson Correlation	1	,472**	,419**	,350**	,374**	,692**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KPWP2	Pearson Correlation	,472**	1	,485**	,504**	,321**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KPWP3	Pearson Correlation	,419**	,485**	1	,526**	,544**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KPWP4	Pearson Correlation	,350**	,504**	,526**	1	,582**	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KPWP5	Pearson Correlation	,374**	,321**	,544**	,582**	1	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_KPWP	Pearson Correlation	,692**	,748**	,793**	,784**	,745**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100



\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan Tabel 5 menyatakan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kepatuhan wajib pajak (KPWP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Maka secara keseluruhan dapat dilakukan uji-uji berikutnya.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian in untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS version 24.0. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 dalam.

Tabel 6. Uji Realiabilitas Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,831	5

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan hasil uji yang terlihat dalam Tabel 6, nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1) 0,831. Karena nilai > 0,7 maka dapat disimpulkan instrumen kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Tabel 7. Uji Realiabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,903	5

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan hasil uji yang terlihat dalam Tabel 7, nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* variabel pemahaman perpajakan (X2) 0,903. Karena nilai > 0,7 maka dapat disimpulkan instrumen pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Tabel 8. Uji Realiabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,833	5

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan hasil uji yang terlihat dalam Tabel 8, nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* variabel kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,833. Karena nilai > 0,7 maka dapat disimpulkan instrumen kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Tabel 9. Uji Realiabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,808	5

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan hasil uji yang terlihat dalam Tabel 9, nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,808. Karena nilai > 0,7 maka dapat disimpulkan instrumen kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

### Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	100	10	24	17.75	3.086
Pemahaman Perpajakan	100	3	25	18.83	3.758
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	25	18.80	3.052
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10	25	18.29	2.924
Valid N	100				

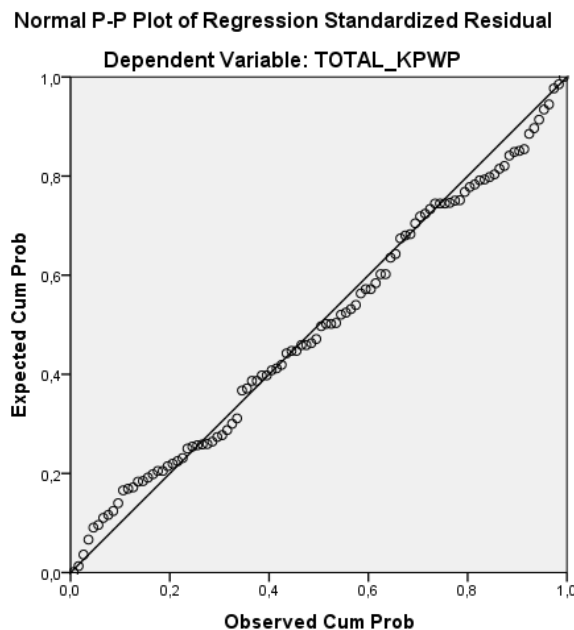
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden ada 100. Dari 100 responden ini variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 24 dengan rata-rata total jawaban 17,75 dan standar deviasi 3,086. Pada variabel pemahaman perpajakan minimum jawaban sebesar 3 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 18,83 dan standar deviasi 3,758. Variabel kesadaran wajib pajak jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban 18,80 dan standar deviasi 3,052. Sedangkan pada variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai minimum 10 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 18,29 dan standar deviasi 2,924.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung (korelasi antar variabel independen dalam model regresi). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi hubungan antara variabel atau tidak terjadi multikolinearitas.

Dalam penelitian ini pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi dengan kriteria pengukurannya yaitu multikolinearitas terjadi jika nilai VIF lebih tinggi dari 0,01 atau VIF lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

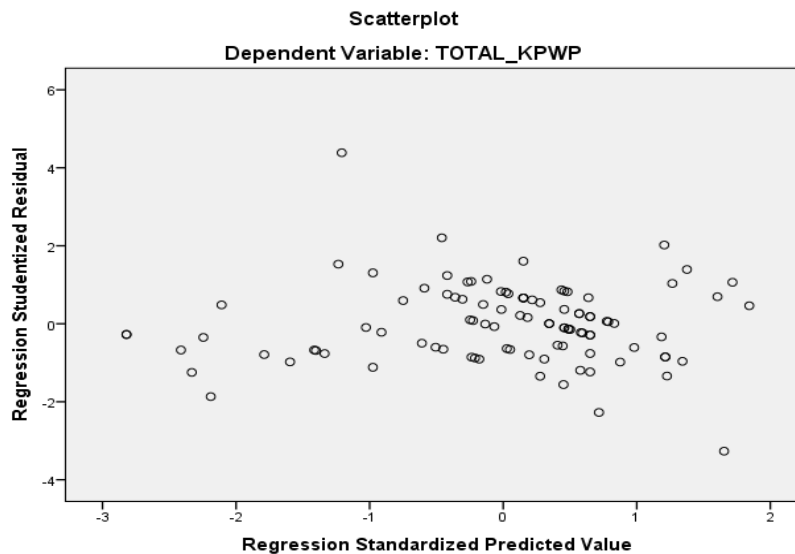
Variabel	Nilai Toleransi	VIF	Keterangan
Kewajiban Kepemilikan NPWP	0,664	1,506	Tidak Multikolinearitas
Pemahaman Perpajakan	0,676	1,479	Tidak Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,58	1,723	Tidak Multikolinearitas

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018).

Hasil pengujian Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas dengan nilai tolerance seluruh variabel independen masing-masing diatas 0,01 dan VIF dibawah 10 yang artinya tidak ada hubungan antar variabel dependen.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018).

Berdasarkan gambar 11, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

## Uji Regresi Berganda

### Regresi Linear Berganda

Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	
	B			Beta
1	(Constant)	4,382	1,499	
	TOTAL_KK	0,394	0,085	0,416
N	TOTAL_PP	0,139	0,069	0,178
	TOTAL_KS	0,229	0,092	0,239
	WP			

a. Dependent Variable: TOTAL\_KPWP

Sumer : Data primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 12 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4,382 + 0,394 X_1 + 0,139 X_2 + 0,229 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : penerimaan pajak

a : Konstanta

b1 : Koefisien regresi kewajiban kepemilikan NPWP

b2 : Koefisien regresi pemahaman perpajakan

b3 : Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

X1 : Kewajiban kepemilikan NPWP

X2 : Pemahaman perpajakan

X3 : Kesadara wajib pajak

e : *Error*

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 4,382 artinya kewajiban kepemilikan NPWP (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak konstan sebesar 4,382.

Koefisien regresi variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1) sebesar 0,394 artinya kewajiban kepemilikan NPWP mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,394 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0,139 artinya pemahaman perpajakan mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,229 artinya kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

### Uji Koefisien Korelasi (R)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,696 <sup>a</sup>	0,484	0,468	2,134

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KSWP, TOTAL\_PP, TOTAL\_KKN

b. Dependent Variable: TOTAL\_KPWP

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

R atau Multiple R menunjukkan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,696. Dalam hal ini karena regresi linier berganda dengan tiga variabel independen maka dikatakan bahwa korelasi berganda antara Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena terletak di antara 0,600 – 0,799. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 14. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00	Tidak ada Korelasi
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 0,999	Sangat Kuat
1,000	Korelasi Sempurna

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa besar persentase variabel independen yaitu Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) yang digunakan dalam model regresi linear berganda ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk mengetahui persentase analisis determinasi, berikut keterangan yang harus diperhatikan dalam mengetahui persentase analisis determinasi:

1. R<sup>2</sup> = 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependennya.
2. R<sup>2</sup> = 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,696 <sup>a</sup>	0,484	0,468	2,134

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KSWP, TOTAL\_PP, TOTAL\_KKN

b. Dependent Variable: TOTAL\_KPWP

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan hasil analisis determinasi yang dapat dilihat pada output model summary dari analisis regresi linear berganda tabel 15 diatas, diperoleh angka R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0,484 atau (48,4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 48,4% atau variasi

variabel independen yang digunakan dalam model (Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 48,8%. Sedangkan untuk sisanya sebesar 51.6% (100% - 48,8%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh indikator lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, denda pajak, dan indikator lainnya.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Tabel 16. Hasil Uji Statistik F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	409,545	3	136,515	29,986	,000 <sup>b</sup>
	Residual	437,045	96	4,553		
	Total	846,590	99			

a. Dependent Variable: TOTAL\_KPWP

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_KSWP, TOTAL\_PP, TOTAL\_KKN

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Berdasarkan tabel anova diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) dan juga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $29,986 > 2,70$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, ini berarti bahwa variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang diharapkan tersebut.

#### Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel IV.22, jika nilai *probability t* < 0,05 maka  $H_a$  diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka  $H_a$  ditolak.

Tabel 17. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,382	1,499		2,923	0,004
	TOTAL_KKN	0,394	0,085	0,416	4,618	,000
	TOTAL_PP	0,139	0,069	0,178	1,999	0,048
	TOTAL_KSWP	0,229	0,092	0,239	2,482	0,015

a. Dependent Variable: TOTAL\_KPWP

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2018)

Tabel diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan  $pvalue < 0,05$ . Ini terlihat dari variabel bebas kewajiban kepemilikan NPWP diperoleh  $t_{hitung} = 4,618$  yakni lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,660$ . Dengan demikian berarti bahwa secara individual kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Untuk variabel bebas kedua yaitu pemahaman perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 1,999 > 1,660$   $t_{tabel}$ . Kesimpulannya bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai  $0,048 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Untuk variabel bebas ketiga yaitu kesadaran wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,482 > 1,660$   $t_{tabel}$ . Hal ini berarti bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai  $0,015 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh signifikan dan kesimpulannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## Pembahasan

### Hasil Uji Hipotesis H1: Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada table 17, nilai  $t_{hitung}$  pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP ( $X_1$ ) adalah 4,618 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai  $t_{hitung}$  4,618 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,660 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari probabilitas signifikan  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP bernilai positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak tanggungannya. Hal ini juga didukung oleh Agus Sugiyono (2017), yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji Hipotesis H2: Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 17, nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) adalah 1,999 dengan tingkat signifikansi 0,048. Karena nilai  $t_{hitung}$  1,999 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,660 dan nilai signifikansinya 0,048 lebih kecil dari probabilitas signifikan  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang paham perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sebagaimana dijelaskan, bahwa pemahaman perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena apabila masih banyak wajib pajak yang tidak paham pajak, maka akan mengurangi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji Hipotesis H3: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 17, nilai  $t_{hitung}$  pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) adalah 2,482 dengan tingkat signifikansi 0,015. Karena nilai  $t_{hitung}$  2,482 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,660 dan nilai signifikansinya 0,015 lebih kecil dari probabilitas signifikan  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang sadar akan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Dian Lestari Siregar (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji Hipotesis H4: Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan ketiga variabel tersebut memang mempunyai pengaruh yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan adanya hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $29,986 > 2,70$  nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas signifikan  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$

diterima yang artinya apabila salah satu dari variabel tersebut ada yang tidak berpengaruh, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

## V. CONCLUSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Permata Regensi II – Kota Tangerang. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Kewajiban kepemilikan NPWP memiliki instrumen yakni administrasi pajak, identitas wajib pajak, menjaga ketertiban, dokumen pajak, dan memiliki penghasilan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan memiliki instrumen yakni memahami peraturan, mengetahui hak dan kewajiban, pembiayaan negara, pendapatan negara, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,048 < 0,05$ . Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mengerti dan paham akan perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak memiliki instrumen yakni pembangunan negara, membayar dan melapor, tepat waktu, penundaan pembayaran, dan penyelenggaraan negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,015 < 0,05$ . Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Dari ketiga simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kewajiban kepemilikan NPWP dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , pemahaman perpajakan dengan nilai signifikan  $0,048 < 0,05$ , dan kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikan  $0,015 < 0,05$  berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan juga dengan adanya hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $29,986 > 2,70$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya apabila salah satu dari variabel tersebut ada yang tidak berpengaruh, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

## REFERENCES

- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Febriyanti, I. (2013). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)*.
- Kurnia, R. S. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniasih, T., Sari, R., & Maria, M. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 44276.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus*.
- Suhendra, Z. (2017). *Gucci Tersangkut Kasus Pajak di Italia*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3754836/gucci-tersangkut-kasus-pajak-di-italia>
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Penerbit Andi.
- Tempo.co. (2013). *Rasio Pajak Rendah, Utang Melonjak*. Bisnis Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/538790/rasio-pajak-rendah-utang-melonjak/full&view=ok>